

**KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**HORAS SIANTURI  
NPM : 71210123153**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**



**MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

**KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA  
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA  
(Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
pada Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Islam Sumatera Utara*

Oleh :

**HORAS SIANTURI  
NPM : 71210123153**

**Program Studi/Konsentrasi : Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara**

Medan, November 2023

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr Maruzki, SH.M.Hum

Dr. Mukidi, SE., SH., M.H

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“Kewenangan Pendamping Desa Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Studi Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”**. Tesis ini dimaksudkan untuk untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proses tersusunnya tesis ini tidak terlepas dari segala bantuan yang telah diberikan oleh banyak pihak dan pada kesempatan ini penulis mengungkapkan rasa penghargaan dan terima kasih yang tulus kepada :

1. Bapak Dr. Danialsyah, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
2. Bapak Prof. Dr. H.M. Yamin Lubis, SH, MS.CN selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
3. Bapak Prof. Dr. Marzuki, SH.M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara sekaligus sebagai Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu
4. Bapak Dr. Mukidi, SE., SH., M.H sebagai selaku pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran dalam pembuatan tesis ini, sehingga dapat diselesaikan tepat waktu

5. Seluruh Dosen pengajar beserta para staff yang terlibat dalam Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang telah banyak memberikan bimbingan dan ilmu yang bermanfaat serta segala bantuannya kepada penulis.
6. Kedua orang tua yang telah membesarkan dan mendidik penulis dari kecil hingga dewasa yang senantiasa memberikan doa dan dukungan hingga saat ini, Mereka memiliki peran yang sangat penting dan tak terhingga, rasanya ucapan terima kasih saja tidak akan pernah cukup untuk menggambarkan wujud penghargaan penulis;
7. Keluarga penulis dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu penulis dalam penyelesaian tesis ini.

Penulis hanya dapat mendo'akan, semoga Allah SWT memberikan limpahan rahmat dan berkahnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya selama ini. Segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis terima dengan tangan terbuka. Semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa rabbal'alamin  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, November 2023  
Penulis

**Horas Sianturi**

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Kerangka Teori.....	10
2. Kerangka Konseptual.....	26
E. Asumsi.....	27
F. Keaslian Penelitian .....	28
G. Metode Penelitian .....	31
1. Sifat Penelitian .....	31
2. Metode Pendekatan .....	32
3. Sumber Data .....	33
4. Alat Pengumpulan Data .....	34
5. Analisis Data .....	36
<b>BAB II : KEWENANGAN PENDAMPING DESA DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TEMBUNG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG</b> .....	<b>37</b>
A. Desa dan Pemerintahan Desa.....	37
1. Pengertian Desa .....	37
2. Pemerintahan Desa .....	41
B. Pendamping Desa.....	45
1. Pengertian Pendamping Desa .....	45
2. Tugas dan Kewenangan Pendamping Desa.....	49
3. Pengangkatan dan Pemberhentian Pendamping Desa.....	54

C. Kewenangan Pendamping Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 3 Tahun 2015 .....	58
<b>BAB III : PELAKSANAAN PENDAMPINGAN DESA DI DESA TEMBUNG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG DALAM BIDANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA.....</b>	<b>71</b>
A. Peran Pendamping Desa Untuk Mendampingi Desa Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang .....	71
B. Pelaksanaan Pendampingan Desa Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur Desa .....	84
<b>BAB IV : HAMBATAN DAN SOLUSI PENDAMPING DESA DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI DESA TEMBUNG KECAMATAN PERCUT SEI TUAN KABUPATEN DELI SERDANG.....</b>	<b>113</b>
A. Hambatan Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	113
B. Upaya Pendamping Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa di desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.....	125
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>131</b>
A. Kesimpulan.....	131
B. Saran.....	132

## DAFTAR PUSTAKA

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin, 2019, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Syarifudin, 2018, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Ariyanto, Nur dan Djoko Puguh Wibowo, 2019, *Modul KKN Tematik Desa Membangun Kerjasama Desa*, Jakarta : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Asshiddiqie, Jimly, 2019, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta : Konstitusi Perss.
- Budiono, Bambang, 2016, *Menelusuri Proses Demokrasi Masyarakat Pedesaan di Indonesia*, Yogyakarta : Renika.
- Eko, Sutoro dan Abdur Rozaki, 2020, *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, Yogyakarta : IRE Press.
- Erwina, Liza, 2016, *Ilmu Hukum*, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Negara Hukum demokrasi dan judicial Review*, Yogyakarta : UII Press.
- ; 2015, *Hukum Pemerintahan Desa*, Setara Press, Malang, 2015
- Ibrahim, Johnny, 2018, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Juliantara, Dadang, 2019, *Pembaharuan Desa, Bertumpu Pada Angka Terbawah*, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama.
- Kansil, CST, 2019, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ; 2016, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Kelsen, Hans, 2016, *Pure Theory of Law* (Penerjemah : Raisul Muttaqien), Bandung : Nusamedia.

- Kessa. Wahyudin, 2016, *Perencanaan Pembangunan Desa*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Kie, Tan Thong, 2018, *Buku I Studi Notaris; Serba Serbi Praktek Hukum*, , Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve.
- Koentjaraningrat, 2017, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kurniawan, Borni, 2015, *Desa Mandiri, Desa Membangun*, Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Lubis, M. Solly, 2014, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- , 2017 *Diktat Teori Hukum*, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Medan : Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum USU.
- Lubis Suhrawardi K, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno, 2018, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta : , Liberty.
- Moleong, Lexy J, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muarif, Untung, 2016, *Pilihan Kepala Desa Demokrasi Masyarakat Yang Teracuni*, Yogyakarta : Mandala.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2020, *Hukum Perikatan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti.
- Nain, Umar, 2019, *Pembangunan Desa Dalam Perspektif Sosiohistoris.*, Makasar : Garis Khatulistiwa.
- Rato, Dominikus, 2016, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Rewansyah, Asnawi, 2017, *Kepemimpinan Dalam Pelayanan Publik*, Jakarta : STIA-LAN.



- Ridwan, H. Juniarso dan Achmad Sodik, 2015, *Tokoh-Tokoh Ahli Pikir Negara dan Hukum*, Bandung : Nuansa.
- Salahudin, M, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Jakarta : Kemernterian Desa PDTT RI.
- Santoso Az, Lukman, 2020, *Hukum Otonomi Desa, Mewujudkan Kemandirian Desa Menuju Masyarakat Sejahtera*, Yogyakarta : Zahir Publishing.
- Sihombing, Eka N.A.M. 2018, *Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Malang: Inteligensia Media.
- Sinamo, Nomensen, 2016, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Intitama Sejahtera.
- Soekanto, Soerjono, 2016, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo,
- Sudarsono, 2016, *Kamus Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Suharnoko, 2019, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suleman, Abdul Rahman, Erika Refida dkk, 2020, *Bumdes Menuju Optimalisasi Desa*, Medan : , Yayasan Kita Menulis.
- Suryabrata, Samadi, 2018, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafrudin, Ateng dan Suprin Na'a, 2016, *Republik Desa*, Bandung : Alumni.
- Widjaja, H.A.W. 2018, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta Rajawali Pers.

## **B. Jurnal**

- Hasjimzoem, Yusnani, 2019, "Dinamika Hukum Pemerintahan Desa," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* ,Vol 8 No. 3.
- Irawati, Erni 2021, "Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa)", *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol.2 No.2.

Mulyanti, Dita Dwi, 2017, *Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Bentuk Unit Usaha Badan Usaha Milik Desa Pada Desa Wisata (Studi Di Desa Wisata Serang Dan Desa Wisata Panusupan)*, Jurnal Hukum Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Volume, 6 Nomor 2.

Nadir, Sakinah, 2019, "Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa," *Jurnal Politik Profetik*, Volume 1 Nomor 1.

Nanda, Listia, 2018, "Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Desa Rawak Hilir Dengan PT. Multi Jaya Perkasa Kiatak Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau", *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Vol 3, No 3

Pamungkas, Bambang Adhi, 2019, "Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa", *Jurnal Law Review*, Vol.2 No.2.

Sitorus. Rolib, 2020, "Pengaturan Kerjasama Pemerintahan Desa Dengan Pihak Ketiga Dalam Pembangunan Desa (*Arrangement Of Village Government Cooperation Withthird Parties In Village Development*)". *Jurnal Stindo Profesional*. Volume VI Nomor 4.

Syaifudin, Ateng, 2020, "Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab", *Jurnal Pro Jusitisia* Edis IV.

Widodo, Ibnu Sam, 2016, *Badan Usaha Milik Desa Salah Satu Alternatif Sumber Pendapatan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Jurnal Panorama Hukum, Vol 1 No.1.

Wijayanti, Septi Nur, 2020, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23 Nomor 2.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa Di Bidang Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.

Peraturan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerjasama Daerah